

## PEMBERDAYAAN PEKERJA PEREMPUAN PADA MASA KRISIS EKONOMI 1997 DI KOREA SELATAN

**Fitri Meutia<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> Bahasa Korea, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Nasional, Jakarta  
[fitri.meutia@civitas.unas.ac.id](mailto:fitri.meutia@civitas.unas.ac.id)

---

### ABSTRAK

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 membuat beberapa negara mengalami kerugian yang sangat besar. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mengalami dampak dari krisis ekonomi tersebut. Banyak perusahaan-perusahaan di Korea mengalami kebangkrutan dan para pekerja yang mengalami pemberhentian pekerja secara masal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pekerja perempuan menjadi pihak pertama dalam daftar pemberhentian pekerja pada saat krisis ekonomi itu terjadi, banyak perempuan yang menganggur dan menjadi pekerja putus asa. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sejarah, yang dimana pengumpulan data menggunakan sumber sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pekerja perempuan mengalami kesenjangan dalam dunia pekerjaan. Mulai dari kesenjangan gender, upah kerja yang rendah hingga kesenjangan sosial.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Pekerja Perempuan, Krisis Ekonomi, Kesenjangan Sosial

---

### ABSTRACT

*The economic crisis that occurred in 1997 caused several countries to suffer huge losses. South Korea is one of the countries experiencing the impact of the economic crisis. Many companies in Korea experienced bankruptcy and workers experienced mass layoffs. The aim of this research is to find out the factors that cause female workers to be the first on the list of layoffs when the economic crisis occurs, many women are unemployed and become discouraged workers. The method in this research uses a descriptive qualitative method with a historical approach, where data collection uses historical sources. The results of this research show that female workers experience gaps in the world of work. Starting from the gender gap, low wages to social inequality.*

**Keywords:** Empowerment of Women Workers, Economic Crisis, Social Inequality

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi adalah suatu kondisi yang mana perekonomian dalam suatu negara mengalami penurunan yang sangat signifikan. Umumnya, negara yang mengalami kondisi tersebut akan mengalami penurunan produk domestik bruto, menurunnya harga properti dan saham, serta tingginya angka inflasi. Penurunan ekonomi mengacu pada perlengkapan pertumbuhan produk domestik bruto atau kontraksi PDB. Selama penurunan, harga properti turun, tingkat pengangguran semakin meningkat, pinjaman turun, dan perusahaan berinvestasi lebih sedikit.

Pada tahun 1997, terbukti menjadi tahun yang sangat krusial bagi Korea Selatan. Dimulai dengan runtuhnya salah satu kelompok *chaebol* dan *Hanbo*, serta beberapa konglomerat besar menjadi bangkrut dan jatuh ke dalam kurator pengadilan. Bank Asia serta investor menarik dana mereka keluar dari Korea Selatan, hal ini menyebabkan Korea Selatan mengalami krisis valuta asing. Terlepas dari upaya pemerintah dan *Bank of Korea*, nilai tukar serta pasar saham menjadi anjlok, menempatkan Korea Selatan hampir di ambang kegagalan atas kewajiban utang luar negeri. Pada tanggal 3 Desember 1997, *Moneter Internasional Fund* (IMF) setuju untuk memberikan dana sebesar 57 miliar dollar pada Korea Selatan, hal ini menjadikan Korea Selatan sebagai negara yang mendapatkan dana terbesar dalam sejarah IMF saat itu. Berbagai kondisi dilampirkan pada pinjaman, termasuk kebijakan ekonomi makro yang ketat, restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi, serta liberalisasi modal (D. Kim dan S. Kim, 2003).

Meningkatnya proporsi keluarga berpenghasilan ganda telah menimbulkan pertanyaan penting tentang peran pekerja perempuan yang sudah menikah dalam ketimpangan pendapatan keluarga. Perubahan sosial menuju kesetaraan gender jelas telah menjadi tren yang tidak dapat diubah sejak pertengahan abad ke-20. Namun, hal itu tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial karena mediasi kelembagaan yang kompleks antara pendapatan individu dari pekerja dan pendapatan keluarga. peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan telah disertai dengan kecenderungan baru bagi perempuan yang lebih berpendidikan untuk berpartisipasi

dalam pekerjaan. Peningkatan tingkat pendidikan perempuan telah menghasilkan lebih banyak pekerjaan daripada sebelumnya, terutama dalam karir dengan meritokrasi yang tercermin dalam remunerasi dan promosi. (Treas 1983, 1987; Maxwell 1990, dalam Kwang-Yeong Shin dan Ju Kong 2015).

Melihat fenomena yang terjadi terhadap kesenjangan pekerja perempuan pada masa krisis ekonomi 1997 di Korea Selatan, dimana pekerja perempuan mendapatkan kesenjangan dalam dunia pekerjaan pada masa krisis ekonomi itu terjadi. Maka, berdasarkan uraian di atas menarik penulis untuk menganalisis pemberdayaan pekerja perempuan pada masa krisis 1997 di Korea selatan. Serta kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menangani pekerja perempuan pada masa krisis ekonomi 1997.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sejarah. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan sumber-sumber sejarah tertentu yang berkaitan dengan krisis ekonomi serta pemberdayaan pekerja perempuan di Korea Selatan, terutama pada masa terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.

Dalam penulisan penelitian sejarah, terdapat 4 tahap pendekatan sejarah yang dapat dilakukan sebelum melakukan penelitian. Tahap pertama berupa heuristik merupakan metode pertama yang dilakukan dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini peneliti mencari atau mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang terkait dengan penelitian. Tahap kedua dilakukan dengan kritik. kritik terdapat dua bagian, kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal merupakan kritik yang didasarkan pada keakuratan dan keaslian sumber sejarah. Kritik internal merupakan kritik yang didasarkan pada isi sumber sejarah yang digunakan. Artinya, peneliti perlu menguji isi dari sumber, baik secara kebendaan maupun secara tulisan.

Tahap ketiga dalam penelitian ini adalah interpretasi atau eksplanasi, yaitu peneliti melakukan penafsiran terhadap makna atas fakta-fakta yang ditemukan dalam sumber-sumber sejarah yang penulis dapatkan. Dalam

tahapan ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah dilakukan melalui proses kritik.

Tahap yang terakhir merupakan tahapan historiografi atau penulisan sejarah. Dalam tahap ini fakta-fakta tentang sejarah yang ditemukan kemudian diseleksi, disusun, diberi penekanan, dan ditempatkan dalam suatu urutan yang kronologis serta sistematis. Penulis menyeleksi dan memberi penekanan pada fakta-fakta yang bisa menggambarkan proses dari pemberdayaan pekerja perempuan pada masa krisis ekonomi 1997 di Korea Selatan.

### HASIL PENELITIAN

Pada tahun 1960-an, pemerintah otoriter Korea Selatan menggunakan industri manufaktur untuk memperoleh modal asing. Dari strategi ini, para pekerja perempuan di Korea Selatan menjadi target untuk bekerja di bidang industri manufaktur seperti industri tekstil, pengolahan karet, pengolahan plastik, pembuatan porselen, pembuatan sepatu, dan kerajinan gerabah. Barang-barang yang dihasilkan dari industri tersebut kemudian diekspor yang memungkinkan akan masuknya modal asing. Perekonomian Korea Selatan bergerak dari pertanian, manufaktur, hingga bidang jasa. Dengan seiring berjalannya waktu, para pekerja di bidang pertanian mulai menurun dari 66 persen menjadi 34 persen. Sedangkan peminatan kerja dalam industri manufaktur meningkat drastis dari 9 persen hingga 22,6 persen, dan peminatan kerja dalam bidang jasa naik dari 25 persen menjadi 43,4 persen.

Saat Korea Selatan menghadapi persaingan dengan negara-negara di Asia seperti Cina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam bidang manufaktur. Mengakibatkan pemerintah otoriter Korea Selatan harus memutuskan untuk beralih ke dalam industri manufaktur berat seperti pengembangan produk dalam bidang teknologi pada awal tahun 1970-an. Industri manufaktur ini diperluas ke beberapa industri lainnya, seperti industri baja, industri otomotif, industri peralatan elektronik, dan industri pembuatan kapal. Yang mana semua pekerjaan itu dikhususkan bagi para laki-laki (Hamilton dan Kim 1993, Kim dan Voos 2007).

Meskipun undang-undang baru yang mengatur kesetaraan gender dan kebutuhan

para pekerja perempuan, banyak permasalahan yang tidak segera ditangani oleh pemerintah. Misalnya, banyak pekerja perempuan yang masih belum menerima bantuan dalam hal pengasuhan anak serta banyak perempuan yang bekerja dengan menghadapi banyak kesulitan karena memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu. Undang-undang baru mungkin lambat dalam membawa sebuah perubahan pada situasi pekerjaan di Korea Selatan. Meskipun beberapa kelompok tentang kepedulian hak perempuan telah muncul sebelum perang dunia II, hal ini tidak terlalu dipedulikan dengan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.

### Pentingnya Pendidikan bagi Pekerja

Pada tahun 1994, ketika pemerintahan Kim Secara drastis melonggarkan pendaftaran untuk perguruan tinggi. Pada tahun 1996, pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan presiden tentang aturan dan peraturan pendirian serta pengelompokan perguruan tinggi. Dengan demikian, APK Korea Selatan dalam perguruan tinggi meningkat dengan pesat dari 39,5 persen pada tahun 1992 menjadi 64,5 persen pada tahun 1997. Akibatnya, sebagian besar institusi perguruan tinggi di Korea Selatan menjadi swasta, dan mayoritas mahasiswa terdaftar di lembaga swasta tersebut. Banyaknya mahasiswa yang mendaftar di perguruan tinggi hal ini menyebabkan keebihan pasokan lulusan universitas, yang mempengaruhi pasar tenaga kerja. Di sisi lain, dalam mengitung penyebab kesenjangan dalam upah kerja, penentuan koefisien variabel skala perusahaan meningkat, menunjukkan tren yang kelas menuju ukuran perusahaan menentukan tingkat dalam hal upah kerja. Kesenjangan upah kerja yang muncul di antara pekerja kerah putih yang memiliki pendidikan di perguruan tinggi didasarkan pada ukuran perusahaan serta upah yang dipromosikan. Perluasan perguruan tinggi disertai dengan harapan peningkatan pekerjaan, tetapi tawaran pekerjaan yang diharapkan oleh lulusan dari perguruan tinggi tidak meningkat di era globalisasi, terutama setelah krisis ekonomi di Asia (N. Isozaki, 2019).

### Ketidakstabilan Pekerja Perempuan

Menurut statistik kementerian tenaga kerja, Kim Tae-hong 1994 dalam 2017, jumlah pekerja jangka pendek kurang dari 36 jam pada kuartal kedua meningkat sebesar 37,6 persen pada tahun 1997 dari tahun sebelumnya. Menurut peraturan ILO, istilah “kerja paruh waktu” adalah “kerja yang lebih pendek dari jam kerja yang ditentukan oleh pekerja paruh waktu” dan menetapkan standar internasional untuk perlindungan hukum terhadap pekerja paruh waktu. Mengenai hak untuk bertindak sebagai perwakilan pekerja dalam hak persatuan dan hak negosiasi kelompok dalam kesehatan industri, pekerja dan diskriminasi profesional, pekerja paruh waktu harus mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja biasa serta mendapatkan jaminan yang sama mengenai upah kerja, jaminan sosial, perlindungan perempuan yang telah melahirkan, cuti tahunan, hari libur, dan cuti karena sakit (2017).

### Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pekerja

Pemerintahan baru telah berusaha untuk mereformasi program kesejahteraan sosial di luar pertemuan kebutuhan yang disebabkan oleh krisis. Perhatian yang dominan dari reformasi adalah kesetaraan serta solidaritas sosial. Cara utama untuk mencapai tujuan ini ialah dengan menciptakan asuransi sosial universal, beberapa program yang telah ada di negara-negara maju. Program perlindungan usia hari tua diperluas untuk mencakup hampir seluruh penduduk nasional pada awal tahun 2000-an. *National pension* diperkenalkan di perusahaan besar pada tahun 1988 sampai pertengahan tahun 1990-an.

Perluasan cakupan program asuransi sosial, integrasi masyarakat asuransi di the national health insurance (NHI) serta pengenalan the national basic livelihood security (NBLS), dengan bersamaan telah menandakan era baru dalam perkembangan sistem kesejahteraan sosial di Korea Selatan. Sering dikatakan bahwa tujuan reformasi asuransi sosial adalah untuk mencapai solidaritas sosial berdasarkan pendekatan universalistik.

### Prospek Masa Depan

Korea Selatan telah melakukan upaya serius untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduknya. Sebuah cara utama untuk mencapai tujuannya adalah dengan memperluas program asuransi sosial untuk mencocokkan mereka di dalam kesejahteraan. Asuransi umum yang mencakup hampir seluruh penduduk serta memberikan manfaat yang besar. Minoritas tidak tercukup akan dilindungi oleh skema bantuan publik yang direformasi. Upaya reformasi menghasilkan beberapa hasil positif tetapi tidak terlalu berhasil. Sistem kesejahteraan sosial berdasarkan asuransi sosial universal mungkin terlalu mahal untuk mempertahankan dan tidak terlalu efektif dalam melindungi keluarga yang kurang beruntung. Namun, pengalaman reformasi juga telah menyarankan beberapa pelajaran yang berguna serta telah menunjukkan prospek masa depan

Dari kutipan di atas terlihat jelas Perhatian dominan dalam reformasi adalah pada kesetaraan serta solidaritas sosial, sekarang lebih banyak perhatian diberikan pada pengendalian serta efisiensi pengeluaran, pengalaman Korea menyarankan bahwa untuk memulihkan keseimbangan fiskal, program asuransi sosial dapat lebih sederhana daripada di negara-negara barat. Kasus yang paling serius adalah dari sistem pensiun. Pengurangan substansial dari tingkat penggantian akan menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan keseimbangan fiskal. Tingkat pengganti saat ini dikenal tinggi dengan standar internasional (Bank Dunia, 2000). Skala manfaat formula akan membantu untuk meningkatkan kelayakan fiskal. Manfaat yang lebih rendah ini akan menyebabkan ketidakamanan pendapatan serta kemiskinan penduduk, tanpa perubahan signifikan lainnya. Salah satu opsi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menambahkan program iuran pasti untuk NP. Ini akan membantu dana pensiun berkelanjutan secara finansial, karena program iuran pasti bersifat netral dalam hal redistribusi. Selain itu, program iuran berbasis investasi dapat menghasilkan manfaat yang lebih tinggi daripada program imbalan pasti, karena tingkat pengembalian investasi cenderung lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan di era populasi yang akan datang serta menurunkan pertumbuhan pendapatan (Feldstein, 2005).

Pendekatan inovasi mungkin diperlukan untuk memperluas cakupan asuransi sosial kepada keluarga kurang mampu. Untuk pekerja yang tidak aman serta untuk pekerja mandiri, perluasan cakupan akhirnya tergantung pada kesediaan peserta untuk berkontribusi, mengingat kapasitas administratif yang terbatas untuk membuat penilaian pendapatan yang akurat. Korea telah mengadopsi pendekatan *top-down* di mana pemerintah menerapkan skema yang dirancang untuk pekerja inti dalam pekerjaan yang aman (Van Ginneken, 1999). Namun, metode perluasan cakupan ini belum menerima dukungan yang tinggi dari yang bukan peserta. Mungkin ada beberapa cara untuk mendorong partisipasi sukarela di antara orang-orang yang kurang beruntung dalam pekerjaan.

Lebih banyak penekanan akan ditempatkan pada manfaat yang ditargetkan daripada pro-universal untuk mendukung keluarga berpenghasilan rendah yang tidak terlindungi. Asuransi sosial mungkin tidak berfungsi sebagai sarana efektif untuk membantu keluarga berpenghasilan rendah seperti di negara-negara barat. Skema bantuan publik hanya mencakup yang sangat miskin di antara mereka. Untuk keluarga berpenghasilan rendah berbadan sehat, pilihan yang tersedia mungkin penciptaan kebijakan “membuat kepekerja membayar”. Sedangkan pengenalan kredit pajak penghasilan kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, bantuan medis serta subsidi perumahan dapat menurunkan pengeluaran konsumsi. Dukungan pendidikan untuk anak-anak berpenghasilan rendah adalah semakin penting. Penitipan anak serta perawatan jangka panjang untuk orang tua serta penyandang cacat mungkin meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi pengeluaran kerja. Peran pendukung dalam pendapatan yang berkurang dilengkapi dengan perluasan lapangan kerja. Dukungan yang meningkatkan lapangan kerja melalui langkah-langkah pasar tenaga kerja aktif serta jasa sosial. Sementara reformasi baru-baru ini sebagian besar berfokus pada perluasan cakupan pendapatan program dukungan, tren yang muncul adalah meningkatkan penyediaan program layanan sosial untuk mendukung pekerjaan. Subsidi dari pemerintah untuk penitipan anak meningkat pesat serta asuransi sosial untuk

perawatan jangka panjang bagi orang tua akan diperkenalkan.

## PEMBAHASAN

Selama krisis banyak perusahaan yang bangkrut dan terpaksa memberhentikan pekerjanya secara masal. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang mulai goyah, pekerja perempuan menjadikan hal pertama kali untuk diberhentikan dalam restrukturisasi bank serta lembaga keuangan. Banyak pekerja perempuan yang merasa putus asa dalam mencari pekerjaan. Melihat bagaimana kesenjangan yang dialami oleh kaum perempuan di dunia kerja sangat rendah. Di sisi lain, bagi perempuan yang sudah menikah mengalami efek pekerja tambahan, dimana dulu terdapat sebuah tren dimana seorang perempuan yang sudah dengan terpaksa harus ikut mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena krisis ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan upah kerja terhadap laki-laki atau suami mereka.

Bagi sebagian perempuan yang berusia 30-an yang memiliki gelar sarjana memilih mengambil pekerjaan sebagai tutor (*kwase*), sementara yang lainnya mengambil pekerjaan sebagai pekerjaan kebersihan. Pemerintah telah melakukan upaya serius untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduknya. Sebuah cara utama untuk mencapai tujuannya adalah dengan memperluas program asuransi sosial untuk mencocokkan mereka di dalam kesejahteraan. Asuransi umum yang mencakup hampir seluruh penduduk serta memberikan manfaat yang besar. Sistem kesejahteraan sosial berdasarkan asuransi sosial mungkin terlalu mahal untuk mempertahankan dan tidak terlalu efektif dalam melindungi keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi. Namun, pengalaman reformasi juga telah menyarankan beberapa pelajaran yang berguna serta telah menunjukkan prospek masa depan.

Program bantuan publik adalah program kemampuan yang menyediakan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program mengklasifikasikan penerima menjadi empat kategori. Kategori pertama termasuk mereka yang tidak memiliki penghasilan serta harus tinggal di lembaga perumahan umum baik sementara atau semi permanen karena faktor usia, kecacatan mental, kehamilan di luar

nikah, kekerasan dalam rumah tangga. Kategori kedua mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan penghasilan tetap, tapi mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Kategori menunjukkan pekerja miskin yang memiliki penghasilan tetapi hidup dalam kemiskinan. Kategori keempat termasuk orang-orang yang menjadi penerima manfaat pengobatan gratis.

Pemerintah telah melakukan upaya serius untuk memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat Korea Selatan. Program yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan adalah memperluas program asuransi yang dapat mencakup seluruh penduduk serta memberi manfaat yang besar bagi pemerintah Korea Selatan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Selama krisis dimulai banyak perusahaan yang bangkrut dan terpaksa memberhentikan pekerjaannya secara masal. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang mulai goyah, pekerja perempuan menjadikan hal pertama kali untuk diberhentikan dalam restrukturisasi bank serta lembaga keuangan. Banyak pekerja perempuan yang merasa putus asa dalam mencari pekerjaan. Melihat bagaimana kesenjangan yang dialami oleh kaum perempuan di dunia kerja sangat rendah. Disisi lain, bagi perempuan yang sudah menikah mengalami efek pekerja tambahan, dimana dulu terdapat sebuah tren dimana seorang perempuan yang sudah dengan terpaksa harus ikut mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya, karena krisis ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan upah kerja terhadap laki-laki atau suami mereka.

Program bantuan publik adalah program kemampuan yang menyediakan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program mengklasifikasikan penerima menjadi empat kategori. Kategori pertama termasuk mereka yang tidak memiliki penghasilan serta harus tinggal di lembaga perumahan umum baik sementara atau semi permanen karena faktor usia, kecacatan mental, kehamilan di luar nikah, kekerasan dalam rumah tangga. Kategori kedua mengacu pada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan penghasilan tetap, tapi mereka tinggal di rumah mereka sendiri. Kategori menunjukkan pekerja miskin yang memiliki penghasilan tetapi hidup dalam

kemiskinan. Kategori keempat termasuk orang-orang yang menjadi penerima manfaat pengobatan gratis.

Pemerintah telah melakukan upaya serius untuk memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat Korea Selatan. Program yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan adalah memperluas program asuransi yang dapat mencakup seluruh penduduk serta memberi manfaat yang besar bagi pemerintah Korea Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini masih perlu untuk diteliti lebih dalam lagi terkait pemberdayaan pekerja perempuan. Sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam dengan penggunaan metode yang sesuai dengan tema atau topik penelitian ini. Untuk memperoleh jawaban yang lebih akurat dan lebih luas lagi mengenai pemberdayaan pekerja, baik untuk pekerja perempuan maupun pekerja laki-laki. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini akan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Myung Oak Kim, Sam Jaffe. 2013. *The new Korea mengungkap kebangkitan ekonomi Korea*. Jakarta: Gramedia. (Terjemah)
- Ulum, Chazienul Mochamad & Niken Lastiti V.A. 2020. *Community Empowerment: teori dan praktik pemberdayaan komunitas*. UB press.
- Emery, Robert F. 2018. *Korean Economic Reform: Before and since the 1997 crisis*. (Reissued). New York: Routledge.
- Song, Jesook. 2009. *South Koreans in the Debt Crisis: The Creation of a Neoliberal Welfare Society*. Duke University Press.
- Haggard, Stephan, Wonhyuk Lim, Euysung Kim. 2010. *Economic crisis and corporate restructuring in Korea: reforming the Chaebol*. Cambridge University Press.
- McLoed, Ross H, Ross Garnaut. 1998. *East Asia in crisis from being a miracle to needing one?*. New York: Routledge.
- Jang Sup, Shin. 2014. *The Global financial crisis and the Korean economy*. New York: Routledge.

- Washington, D.C. the national academies press.
- Barraclough, Ruth and Faison, Elyssa. 2009. *Gender and Labour in Korea and Japan: Sexing class*. New York: Routledge.
- Iriansyah, Herinto Sidik. 2020. *Krisis Asia, kapitalisme dan negara kesejahteraan (tinjauan analisis kapitalisme Korea Selatan)*. Jurnal ilmu pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara.
- Kaloka, Yola Natasya, Putri Tegar, M. Eldy. 2019. *Strategi Korea Selatan dalam pemulihan krisis moneter tahun 1997 melalui IMF*. Vol. 2, No.1.
2014. *Economy crisis and women's labor force return after childbirth: Evidence from South Korea*. Sweden: Stockholm University. Vol. 31
- Snehendu Kar. 2013. *Empowerment of women for health development: A Global perspective*. The University of California. Doi: 10.12927/whp.2001.17591 Prasetyo, Donny & Irwansyah. 2020. *Memahami masyarakat dan perspektifnya*.
2014. *1997 년 경제위기와 IMF 구제금융이 금융법에 미친 영향*. Seoul law journal. Vol.55. pp 105-203.
- Kim Hyun Mee. 2018. *Work Experience and Identity of Skilled Male Workers following the Economic Crisis*. Seoul National university.
- Han Hye-Min. 2017. *비정규직 노동자에 대한 정규직 노조의 대응 : 영향요인 및 대응 결과의 검증*. South Korea.
- Jung Soon-hwan. 2017. *The Effects of Low-Skilled Female Immigration on the Native Female Labor Supply: Evidence from South Korea*. Seoul National university.
- Lee So Hee. 2016. *여성근로자에 대한 고용보험제도의 효과성 분석: 성 분석(Gender Analysis)을 중심으로*. Seoul national university.
- Choi Jeong-hwan. 2014. *Did the Great Recession force female spouses to work?*. Seoul National university.
- Kim Se-jik. 2016. *한국경제: 성장 위기와 구조 개혁*. Seoul national university. Vol. 55. No.1. pp 2-27.
- Shin Ji-seop. 2020. *한국의 소득기회불평등 장기추세에 대한 연구*. Seoul national university.
- Song Hyeong-ju. 2014. *이주여성에 대한 시론적 연구 : 유형화와 정부대응을 중심으로*. Seoul national university. Vol.52. no 4. Pp 191-231.
- Lee Byung-hee. 2016. *Hyper-connectivity and the Future of Work: Implications for the Labor Market Reform in South Korea*. South Korea.
- Putri, Dwi A. 2019. *Peran Perempuan dalam Keluarga Korea pada Masa Dinasti Joseon (1392-1910) Berdasarkan Ajaran Konfusianisme*. Universitas Nasional. Karya Tugas Akhir.
- Shin, Kwangyeong & Kong, Ju. 2015. *Women's Work and Family Income Inequality in South Korea*. Development and Society, Vol.44 No.1, pp. 55-76
- Isozaki, N. 2019. *Education, Development, and Politics in South Korea*. Gakushuin University, vol 10 No.209